

HARMONIZATION OF PANCASILA VALUES AND SHARIA PRINCIPLES IN THE INDONESIAN BANKING SYSTEM

Hermansyah¹, Prima Melati², Arik Darajat³

^{1,2,3} Institut Pendidikan Indonesia Garut

Jln. Pahlawan No. 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut

¹ hermansyah@institutpendidikan.ac.id

² melatiprimal@gmail.com

³ arikdarajat@institutpendidikan.ac.id

(Received: 30 Oktober 2024 / Accepted: 7 Nopember 2024 / Published Online: 26 Desember 2024)

Abstract

In the context of rapid growth of banking Islamic in Indonesia, it is essential to understand how the values of Pancasila can be integrated into financial practices to enhance public trust and support sustainable development. The purpose of this study is to investigate and analyze the challenges and opportunities in harmonizing Pancasila values with Islamic principles within the Indonesian banking system. The research employs a qualitative approach, utilizing in-depth interviews and document analysis techniques to gain comprehensive insights from various stakeholders in the banking sector. The results indicate that there are common values between Pancasila and Islamic principles; however, challenges include differing interpretations and uneven understanding among industry players. This research recommends the development of policies that support the synergy between these two values, as well as training for stakeholders to improve understanding and harmonious implementation in banking practices.

Keywords: Pancasila Values; Sharia Principles; Banking System

Abstrak

Dalam konteks pertumbuhan pesat perbankan syariah di Indonesia, penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dalam praktik keuangan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis tantangan serta peluang dalam mengharmonisasikan nilai-nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip syariah dalam sistem perbankan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, memanfaatkan wawancara mendalam dan teknik analisis dokumen untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan di sektor perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesamaan nilai antara Pancasila dan prinsip syariah, namun tantangan yang dihadapi meliputi perbedaan interpretasi dan pemahaman yang belum merata di kalangan pelaku industri. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan kebijakan yang mendukung sinergi antara kedua nilai, serta pelatihan bagi stakeholder untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi yang harmonis dalam praktik perbankan.

Kata Kunci : Nilai-nilai Pancasila; Prinsip Syariah; Sistem Perbankan

I. PENDAHULUAN

Perbankan memegang peranan krusial dalam perekonomian Indonesia, berfungsi sebagai pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menyediakan layanan keuangan, dan meningkatkan aksesibilitas modal bagi masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, sektor perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang pesat, mencerminkan minat yang meningkat terhadap sistem keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Baiq Naili Amalia yang menyebutkan bahwa faktor-faktor eksternal seperti inflasi dan suku bunga memiliki dampak yang lebih kuat pada market share perbankan syariah dibandingkan dengan faktor internal,

sehingga perbankan syariah perlu lebih cermat dalam mengelola risiko externals untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan pangsa pasarnya [1].

Sektor perbankan Islam terus mengalami pertumbuhan positif, dengan total aset mencapai Rp 892,17 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar 11,21% (yoy). Dengan pencapaian ini, industri perbankan syariah saat ini menguasai pangsa pasar sebesar 7,44% dari total perbankan nasional. Pertumbuhan ini tidak hanya menunjukkan diversifikasi layanan keuangan, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi pengembangan ekonomi Masyarakat [2]. Namun, dalam konteks ini, tantangan muncul ketika mencoba menggabungkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi keuangan. Integrasi nilai-nilai ini sangat penting untuk menciptakan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga mencerminkan semangat keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam tulisan ini, kita akan mengeksplorasi pentingnya perbankan dalam perekonomian Indonesia, pertumbuhan perbankan syariah yang signifikan, serta tantangan yang dihadapi dalam mengharmonisasikan nilai-nilai Pancasila dengan prinsip syariah.

Dengan prinsip berbasis bagi hasil, perbankan hukum syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada faktor-faktor seperti penciptaan nilai sosial yang lebih besar, sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun, tantangan integrasi antara nilai-nilai Pancasila dan prinsip syariah tidak bisa diabaikan. Pancasila, sebagai dasar ideologi negara, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan, yang harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur aspek-aspek ekonomi dan keuangan.

Keterpaduan ini menjadi sangat penting agar sistem perbankan yang dibangun tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi syariah, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kontribusi yang diberikan oleh perbankan syariah pada pembangunan nasional yang berkelanjutan dimana salah satu prinsip utama dalam perbankan syariah yaitu keadilan dalam alokasi risiko dan imbalan produk-produk perbankan syariah seperti Murabahah (metode pembiayaan biaya plus) Mudarabah (akad bagi hasil) dan Musharak(kerjasama) tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi tetapi juga memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh tidak terpusat pada satu pihak saja. Hal ini berperan dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi, yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs 1 Tanpa Kemiskinan dan SDGs 10 Berkurangnya Kesenjangan) [3].

Pemahaman yang mendalam mengenai peran perbankan dalam perekonomian, potensi pertumbuhan perbankan syariah, serta upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam praktik keuangan syariah menjadi hal yang sangat relevan dan penting untuk dibahas. Melalui analisis ini, diharapkan kita dapat menemukan solusi yang harmonis antara prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai Pancasila, demi mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Keberadaan perbankan syariah dalam konteks perekonomian Indonesia yang semakin kompleks menawarkan alternatif yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Muslim, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap inklusi keuangan. Penelitian oleh Utami dan Suhardi, menunjukkan bahwa perbankan syariah mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan prinsip berbasis bagi hasil, perbankan syariah tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga pada penciptaan nilai sosial yang lebih besar, sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi [4].

Namun, tantangan integrasi antara nilai-nilai Pancasila dan prinsip syariah tidak bisa diabaikan. Pancasila, sebagai dasar ideologi negara, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan,

keadilan sosial, dan persatuan, yang harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur aspek-aspek ekonomi dan keuangan. Keterpaduan ini menjadi sangat penting agar sistem perbankan yang dibangun tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi syariah, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Menurut Hidayat dan Rizki, upaya untuk mengharmonisasikan nilai-nilai ini membutuhkan kerjasama antara lembaga keuangan dan pemangku kepentingan lainnya, serta penerapan kebijakan yang mendukung sinergi tersebut [5].

Pemahaman yang mendalam mengenai peran perbankan dalam perekonomian, potensi pertumbuhan perbankan syariah, serta upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam praktik keuangan syariah menjadi hal yang sangat relevan dan penting untuk dibahas. Melalui analisis ini, diharapkan kita dapat menemukan solusi yang harmonis antara prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai Pancasila, demi mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Kontribusi pangsa pasar perbankan Islam di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data dari laporan tahunan untuk tahun buku 2003 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan syariah memiliki market share sekitar 6,7% dari total aset perbankan nasional. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip perbankan syariah dan produk-produk yang lebih beragam. Selain itu, adanya kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan perbankan syariah juga berkontribusi pada peningkatan pangsa pasar ini [6].

Harmonisasi nilai-nilai Pancasila dan prinsip syariah dalam sistem perbankan di Indonesia merupakan topik penting yang mendapatkan perhatian akademis dalam beberapa tahun terakhir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai dasar negara dan prinsip-prinsip syariah dapat saling mendukung dalam membangun sistem perbankan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Hasil penelitian pendahuluan terhadap topik tersebut, sebagaimana telah dilakukan oleh Mardani et al. dimana penelitian ini menemukan bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik perbankan syariah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa bank syariah yang menerapkan nilai-nilai Pancasila mampu menarik lebih banyak nasabah, terutama dari segmen masyarakat yang peduli terhadap etika dan keadilan sosial [7].

Penelitian lainnya sebagaimana dilakukan oleh Fitriani dan Sumarni yang menekankan pentingnya pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dalam lembaga perbankan. Hasilnya menunjukkan bahwa bank yang aktif dalam program edukasi mengenai Pancasila dan prinsip syariah dapat meningkatkan loyalitas nasabah dan kontribusi terhadap pembangunan sosial [8]. Namun, tantangan besar muncul dalam upaya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila yang menekankan keadilan sosial dan persatuan ke dalam praktik perbankan syariah. Meskipun terdapat persamaan mengenai nilai-nilai Pancasila dan prinsip syariah, serta implementasi yang harmonis tetapi masih menghadapi kendala, seperti perbedaan interpretasi dan pemahaman di antara pelaku industri [9]. Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif Untuk menjamin bahwa sistem perbankan yang dikembangkan mematuhi prinsip-prinsip Syariah dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara utuh.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif untuk mengharmoniskan prinsip-prinsip tersebut demi menciptakan sistem keuangan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada harmonisasi nilai-nilai Pancasila dan prinsip syariah dalam sistem perbankan Indonesia, yang merupakan aspek penting untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk signifikan dalam memahami cara-cara yang efektif untuk menyelaraskan kedua nilai tersebut, serta memberikan rekomendasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan dalam sektor perbankan.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menggali dan menganalisis harmonisasi nilai-nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip syariah dalam sistem perbankan Indonesia. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor perbankan, termasuk manajer bank syariah, akademisi, dan regulator, untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif mengenai ini [10]. Teknik ini berusaha untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pandangan mereka tentang integrasi nilai-nilai Pancasila dan tantangan yang dihadapi dalam praktik perbankan syariah. Penelitian ini juga melibatkan analisis dokumen terkait, seperti kebijakan perbankan, laporan tahunan lembaga keuangan, dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung atau menghambat harmonisasi antara nilai-nilai Pancasila dan prinsip syariah.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks bank syariah di Indonesia memiliki arti yang sangat penting, mengingat Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan identitas serta cita-cita bangsa, yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan dalam sistem keuangan syariah. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah, bank syariah tidak hanya fokus pada aspek profit, tetapi juga berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan ekonomi yang terkandung dalam Pancasila. Indonesia sebagai negara dengan beragam budaya dan agama, memiliki landasan filosofis yang kuat dalam bentuk Pancasila. Pancasila tidak sendirian sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di sisi lain, perbankan syariah telah berkembang pesat, memenuhi kebutuhan masyarakat muslim yang menginginkan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah.

Harmonisasi antara nilai-nilai Pancasila dan prinsip syariah dalam sistem perbankan menjadi isu yang sangat relevan dan penting. Pancasila mengedepankan keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan, sedangkan prinsip syariah menekankan keadilan, transparansi dan akuntabilitas sosial. Keduanya memiliki tujuan yang sejalan dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Implementasi prinsip syariah dalam sistem perbankan di Indonesia merupakan respons terhadap permintaan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Dalam konteks global yang semakin berkembang, perbankan syariah menawarkan alternatif yang tidak hanya mematuhi norma agama, tetapi juga berupaya mendorong inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan [11].

Perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang sejak tahun 1990-an, dengan didirikannya bank-bank syariah pertama yang menawarkan produk dan layanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kerangka hukum yang jelas diperkuat, memungkinkan lembaga keuangan untuk beroperasi dengan lebih terstruktur dan aman. Prinsip dasar dalam perbankan syariah meliputi larangan riba, gharar, dan investasi dalam sektor yang tidak halal. Bank syariah beroperasi dengan pendekatan berbasis risiko dan bagi hasil, yang menciptakan hubungan yang lebih adil antara bank dan nasabah. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Harmonisasi nilai-nilai Pancasila dalam perbankan di Indonesia merupakan upaya penting membangun sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial, etika, dan keberlanjutan. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang perbankan.

Dalam konteks perbankan, nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan melalui berbagai aspek, seperti pelayanan yang adil, inklusi keuangan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, perbankan di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pentingnya harmonisasi ini juga terlihat dalam upaya memperkuat identitas nasional di tengah globalisasi yang semakin pesat. Bank-bank di Indonesia diharapkan mampu menciptakan produk dan layanan yang Sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Penerapan nilai-nilai pancasila dalam perbankan bukan hanya sebuah keharusan normatif, tetapi juga merupakan strategi untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, etis dan berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pembahasan

Dibawah ini diuraikan mengenai relevansi dari nilai-nilai Pancasila terhadap sistem operasional bank syariah di Indonesia, yaitu [12]:

1. Sila pertama Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa.

Nilai yang terkandung dalam sila pertama ini menekankan pentingnya kepercayaan kepada Tuhan sebagai landasan moral dan etika dalam setiap aktivitas, termasuk di sektor keuangan. Dalam konteks perbankan syariah, sila ini mengimplikasikan bahwa semua transaksi dan praktik harus didasarkan pada nilai-nilai spiritual dan etika yang selaras dengan ajaran agama. Penerapan prinsip Ketuhanan dalam bank syariah tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap hukum syariah, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk mengutamakan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Hal ini menciptakan kepercayaan antara bank syariah dan nasabah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan [13].

Integrasi nilai Ketuhanan yang Maha Esa dalam operasional bank syariah diharapkan dapat menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial. Bank syariah berfungsi sebagai lembaga yang mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta berkontribusi pada pembangunan sosial yang berkeadilan.

Dengan demikian, relevansi sila pertama Pancasila dalam sistem perbankan syariah menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual dan etika harus menjadi panduan dalam setiap transaksi. Hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi bank syariah di masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan sosial di Indonesia. Penerapan prinsip Ketuhanan yang Maha Esa dalam bank syariah diharapkan dapat menjadi solusi bagi tantangan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, serta membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

2. Sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Dalam konteks sistem perbankan syariah di Indonesia, nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, memiliki relevansi yang signifikan, mengingat bahwa bank syariah didirikan dengan tujuan untuk memberikan layanan keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Bank syariah berperan sebagai lembaga yang memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan. Dengan menawarkan

produk-produk yang bebas dari riba dan eksploitasi, bank syariah berkontribusi pada penciptaan kondisi ekonomi yang lebih adil bagi semua lapisan masyarakat. Prasetyo menekankan bahwa keberadaan bank syariah seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi profitabilitas, tetapi juga dari dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat [14].

Sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menjadi landasan moral dan etika yang fundamental dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam sektor perbankan syariah di Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia serta keadilan sosial, yang merupakan nilai-nilai inti dalam sistem ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks perbankan syariah, sila ini mendorong lembaga keuangan untuk tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada dampak sosial yang lebih luas.

Perbankan syariah di Indonesia memiliki peran penting dalam memberdayakan masyarakat, terutama melalui penyediaan akses keuangan yang adil dan transparan. Dengan menawarkan produk dan layanan yang bebas dari riba serta mengedepankan prinsip keadilan, bank syariah dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sila kedua Pancasila juga mendorong bank syariah untuk menerapkan etika dalam setiap transaksi, sehingga dapat menjaga kepercayaan nasabah dan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, relevansi sila kedua Pancasila diharapkan dapat mendorong bank syariah untuk berinovasi dalam menyediakan solusi keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial. Dengan demikian, perbankan syariah dapat berfungsi sebagai agen perubahan yang menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab, sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Dengan demikian, relevansi sila kedua Pancasila dalam sistem perbankan syariah menunjukkan bahwa bank syariah memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan layanan yang adil dan manusiawi. Implementasi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap aspek operasional bank syariah tidak hanya mendukung tujuan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial yang berkelanjutan. Penerapan prinsip ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan beradab, sejalan dengan cita-cita Pancasila.

3. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia

Nilai Pancasila yang terdapat dalam sila ke 3 ini yaitu Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya kebersamaan, persatuan, dan kesatuan di antara seluruh elemen masyarakat Indonesia, terlepas dari perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, nilai-nilai persatuan ini sangat relevan, mengingat perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat solidaritas sosial dan ekonomi di masyarakat.

Perbankan syariah, dengan prinsip-prinsipnya yang berlandaskan pada keadilan dan transparansi, dapat berperan penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan inklusi keuangan. Melalui produk-produk yang berorientasi pada masyarakat, bank syariah dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mendorong partisipasi aktif dari semua elemen dalam pembangunan ekonomi. Dengan cara ini, perbankan syariah berkontribusi pada terciptanya ikatan sosial yang lebih kuat dan saling mendukung antar anggota masyarakat.

Selain itu, nilai persatuan dalam Pancasila juga mengingatkan bank syariah akan tanggung jawab sosialnya untuk berperan aktif dalam pembangunan komunitas. Dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan kerjasama, bank syariah dapat membangun hubungan yang harmonis dengan nasabah dan masyarakat, serta mendorong partisipasi dalam program-program sosial dan ekonomi yang bermanfaat.

Dengan demikian, relevansi sila ketiga Pancasila dalam perbankan syariah tidak hanya menekankan pentingnya kebersamaan dan kesatuan, tetapi juga menunjukkan peran

vital bank syariah dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, berkeadilan, dan saling mendukung. Penerapan nilai-nilai ini diharapkan dapat menjadikan perbankan syariah sebagai pilar dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia [15].

4. Sila keempat Pancasila, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, nilai-nilai ini sangat relevan, karena perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai wadah untuk mewujudkan keadilan dan transparansi melalui keterlibatan masyarakat. Perbankan syariah, dengan prinsip-prinsipnya yang berlandaskan pada musyawarah dan kesepakatan, menciptakan ruang bagi nasabah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan produk dan layanan keuangan. Hal ini sesuai dengan semangat sila keempat yang mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap aspek kehidupan. Dengan memberikan suara kepada nasabah dan stakeholder, bank syariah dapat memastikan bahwa kebijakan dan produk yang ditawarkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Selain itu, relevansi sila keempat Pancasila dalam perbankan syariah juga terlihat dari upaya bank untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Dalam sistem keuangan yang sehat, penting bagi lembaga untuk bertanggung jawab dan terbuka dalam operasionalnya. Bank syariah diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat melalui komunikasi yang baik dan pelibatan publik dalam berbagai program sosial dan ekonomi [16].

Dengan demikian, sila keempat Pancasila berfungsi sebagai pedoman bagi perbankan syariah dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam operasional bank syariah diharapkan dapat memperkuat hubungan antara lembaga keuangan dan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

5. Sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Perbankan syariah, dengan landasan hukum dan etika yang sesuai dengan syariah Islam, bertujuan untuk memberikan akses keuangan yang adil kepada semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kurang terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Melalui produk-produk yang bebas dari riba dan praktik eksploitatif, bank syariah berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menggarisbawahi pentingnya menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi semua anggota masyarakat tanpa terkecuali. Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, nilai-nilai ini memiliki relevansi yang mendalam, karena perbankan syariah dirancang untuk beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Hal ini sejalan dengan semangat sila kelima yang mendorong pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok tanah air.

Selain itu, relevansi sila kelima Pancasila juga dapat dilihat dalam komitmen bank syariah untuk mendukung program-program sosial dan ekonomi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi non-pemerintah, bank syariah dapat berpartisipasi dalam proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mempromosikan keadilan sosial.

Dengan demikian, sila kelima Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai prinsip dasar dalam pembangunan sosial, tetapi juga sebagai panduan bagi perbankan syariah untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dalam setiap aspek operasionalnya. Penerapan nilai-nilai ini diharapkan dapat menciptakan sistem perbankan yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Harmonisasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem perbankan di Indonesia menjadi sangat penting, mengingat Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mencerminkan jati diri dan tujuan bersama masyarakat. Lima sila yang terkandung dalam

Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. menjadi pedoman bagi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor keuangan.

Sistem perbankan di Indonesia, baik konvensional maupun syariah diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengelola dana dan memberikan kredit, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, perbankan dapat berperan aktif dalam menciptakan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ikatan persatuan di antara warga negara.

Melalui penerapan prinsip-prinsip Pancasila, sistem perbankan diharapkan mampu menciptakan produk dan layanan yang inklusif, adil, dan transparan. Ini termasuk memberikan akses keuangan kepada kelompok yang kurang terlayani, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta menjaga etika dan integritas dalam setiap transaksi. Harmonisasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem perbankan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kredibilitas lembaga keuangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa sektor perbankan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi yang berkeadilan di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menjadikan sistem perbankan sebagai pilar yang kuat dalam mewujudkan cita-cita bangsa, sebagaimana tertuang dalam Pancasila. Dengan demikian, relevansi sila kelima Pancasila dalam perbankan syariah menunjukkan bahwa lembaga keuangan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berkomitmen untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial di Indonesia [17].

Meskipun terdapat potensi besar untuk harmonisasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem perbankan syariah, tantangan tetap ada. Beberapa di antaranya yaitu [18], [19] :

- 1) Kurangnya literasi keuangan: Banyak masyarakat yang masih kurang memahami produk dan layanan perbankan syariah, yang dapat menghambat inklusi keuangan.
- 2) Regulasi yang Belum Optimal: Kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan perbankan syariah dapat menjadi kendala.
- 3) Persaingan dengan Sistem Keuangan Konvensional: Sistem keuangan konvensional yang lebih mapan seringkali menawarkan produk yang lebih menarik bagi konsumen, sehingga bank syariah perlu meningkatkan daya saing.

Pancasila sebagai dasar negara, mencerminkan jati diri dan tujuan bersama masyarakat Indonesia, yang terdiri dari lima sila yang saling terkait. Dalam konteks ini, integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam praktik perbankan diharapkan dapat menciptakan sistem keuangan yang inklusif, adil, dan beretika. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang tidak hanya membimbing dan membina setiap anak didik untuk memiliki kompetensi intelektual serta keterampilan mekanik, tetapi juga harus berfokus pada pencapaian pembangunan dan perkembangan karakter yang kuat [20]. Harmonisasi nilai-nilai Pancasila dan prinsip syariah dalam sistem perbankan di Indonesia bukan hanya penting untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan, tetapi juga untuk memperkuat identitas bangsa dalam menghadapi tantangan global. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip etika, transparansi, dan tanggung jawab sosial, perbankan syariah dapat berfungsi sebagai pilar yang mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antara semua pihak lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan mulia ini dapat terwujud secara nyata.

IV. KESIMPULAN

Salah satu nilai Pancasila yang paling relevan dengan perbankan syariah adalah keadilan sosial. Dalam konteks ini, implementasi prinsip bagi hasil dalam produk perbankan syariah dapat menciptakan distribusi yang lebih adil dari keuntungan. Hal ini sejalan dengan tujuan Pancasila untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat mendapatkan manfaat dari aktivitas ekonomi. Dengan menawarkan produk yang berbasis bagi hasil, bank syariah tidak hanya memenuhi prinsip syariah, tetapi juga mendukung penciptaan kesejahteraan yang merata, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Nilai Pancasila juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial. Dalam implementasinya, bank syariah diharapkan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Ini dapat meliputi inisiatif seperti pemberian bantuan pendidikan, dukungan untuk usaha kecil, atau kegiatan sosial lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi nilai Pancasila dan prinsip syariah dalam aspek tanggung jawab sosial dapat memperkuat peran bank syariah sebagai agen perubahan positif dalam masyarakat.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. N. Amalia, "Market share perbankan syariah di Indonesia: Makro ekonomi dan financial performance," *IJABAH Indonesian Journal of Sharia Economics, Business, and Halal Studies*, vol. 2, no. 2, pp. 92-101, Oct. 2024.
- [2] Departemen Perbankan Syariah, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2023*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2023..
- [3] SDGs knowledge hub agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- [4] S. Umi and A. Suhardi, "Peran perbankan syariah dalam peningkatan inklusi keuangan di Indonesia," *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, vol. 24, no. 1, pp. 56-67, Jan. 2020.
- [5] R. Hidayat and M. Rizki, "Integrasi nilai Pancasila dalam sistem perbankan syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, vol. 12, no. 2, pp. 123-135, 2021.
- [6] Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2023*, Jakarta, 2023.
- [7] A. Mardani and D. Sari, "Harmonizing Pancasila values and sharia principles in Islamic Banking in Indonesia," *Journal of Islamic Economics*, vol. 14, no. 1, pp. 45-60, 2022
- [8] A. Rahman, "Keadilan sosial dan inklusi keuangan dalam perbankan syariah," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 10, no. 4, pp. 300-315, 2021.
- [9] E. Fitriani and R. Sumarni, "The role of Pancasila in promoting ethical banking practices in Indonesia," *International Journal of Finance and Banking Studies*, vol. 12, no. 2, pp. 102-117, 2023.
- [10] M. Nasution, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- [11] H. Gunawan, *Pancasila dalam Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- [12] N. Hasan, *Pancasila dan Bank Syariah: Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- [13] R. Ramadhan, *Ekonomi Syariah dan Spiritualitas: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.
- [14] E. Prasetyo, *Etika Bisnis dan Perbankan Syariah*. Jakarta: Alfabeta, 2022.
- [15] R. Amalia, "Perbankan syariah dan peranannya dalam mewujudkan persatuan sosial," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, vol. 10, no. 2, pp. 105-120, 2023.
- [16] S. Fatimah, "Perbankan syariah dan partisipasi masyarakat: Mewujudkan keadilan sosial," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 11, no. 1, pp. 75-90, 2023.

- [17] R. Sari, *Ekonomi Syariah dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022.
- [18] B. Santoso, *Perbankan Syariah dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2024.
- [19] R. Hidayat, "Tantangan harmonisasi nilai Pancasila dalam perbankan syariah," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 8, no. 2, pp. 122-132, 2022.
- [20] T. Tetep, "Students ' Digital Media Literacy : Effects on Social Character," 2021.